

INDIKATOR

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

2023



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Selatan 2023

Katalog: 3102033.63
No.Publikasi: 63000.24025

Ukuran Buku: 21cm x 14,8cm
Jumlah Halaman: 32 halaman

Penyusun Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan

Pembuat Kover:

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan

Penerbit:

©Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan

Sumber Ilustrasi:

www.unsplash.com
www.freepik.com
www.flaticon.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan

KATA PENGANTAR

Publikasi **Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Selatan 2023** merupakan publikasi yang memuat indikator-indikator pilihan terkait dengan SDGs yang tersedia di BPS Provinsi Kalimantan Selatan hingga tahun 2023 beserta penjelasan ringkasnya. Terdapat beberapa indikator utama yang dapat ditampilkan pengukurannya melalui berbagai sensus dan survei yang telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan.

Publikasi ini dapat terselesaikan berkat kerjasama dan partisipasi berbagai pihak. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, kami sampaikan penghargaan dan terimakasih. Semoga publikasi yang disajikan dapat bermanfaat bagi pengguna untuk berbagai keperluan. Kami mengharapkan tanggapan dan saran dari para pengguna publikasi ini untuk perbaikan pada edisi yang akan datang.

Banjarbaru, Juli 2024
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Kalimantan Selatan



Martin Wibisono

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR GAMBAR	5
TENTANG SDGs	8
17 TUJUAN SDGs	10

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1 Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Nasional di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2023	11
Gambar 2 Proporsi Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2023.....	11
Gambar 3 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Terhadap Layanan Air Minum Bersih dan Fasilitas Buang Air Besar Sendiri di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2023 (persen).....	12
Gambar 4 Prevalensi Balita <i>Stunting</i> di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2023 (persen).....	13
Gambar 5 Nilai Tambah Pertanian per Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2023 (ribu rupiah per orang).....	13
Gambar 6 Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2023 (persen).....	14
Gambar 7 Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2023 (persen).....	14
Gambar 8 Persentase Merokok pada Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2023 (persen)	15
Gambar 9 <i>Unmet Need</i> Pelayanan Kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2023 (persen).....	15
Gambar 10 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2023.....	16
Gambar 11 Tingkat Partisipasi Dalam Pembelajaran yang Terorganisir (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2023 (persen).....	16
Gambar 12 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2023 (persen)	16
Gambar 13 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan, 2021-2023.....	17

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 14 Proporsi Remaja (15-24 Tahun) dan Dewasa (15-59 Tahun) dengan Keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2023 (persen)	18
Gambar 15 Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2023	18
Gambar 16 Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2023 (persen).....	19
Gambar 17 Proporsi Perempuan yang Berada di Posisi Manajerial di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2023 (persen).....	19
Gambar 18 Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Cuci Tangan dengan Sabun dan Air di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2023 (persen).....	20
Gambar 19 Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2023.....	20
Gambar 20 Rasio Elektrifikasi dan Penggunaan Gas Rumah Tangga di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2023.....	21
Gambar 21 Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2023 (persen).....	22
Gambar 22 PDRB ADHB per Kapita per Tahun (ribu rupiah) dan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK per Kapita (persen) di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2023.....	22
Gambar 23 Proporsi Tenaga Kerja Informal di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2023 (persen).....	23
Gambar 24 Upah Rata-Rata per Jam Pekerja di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2023 (rupiah).....	23
Gambar 25 Persentase Penduduk Usia Muda (15-24 Tahun) yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja, atau Mengikuti Pelatihan di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2023 (persen).....	23
Gambar 26 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Setengah Pengangguran di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2023	24

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 27 Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara di Provinsi Kalimantan Selatan, 2021-2023 (orang).....	24
Gambar 28 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan terhadap Total PDRB Kalimantan Selatan, 2020-2023 (persen).....	25
Gambar 29 Laju Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2023 (persen).....	25
Gambar 30 Koefisien GINI dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2023.....	26
Gambar 31 Proporsi Penduduk yang Hidup di Bawah 50 Persen dari Median Pendapatan di Kalimantan Selatan, 2020-2023...	26
Gambar 32 Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau di Provinsi Kalimantan Selatan, 2023 (persen).....	27
Gambar 33 Proporsi Penduduk Terlayani Transportasi Publik di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020 (persen).....	27
Gambar 34 Proporsi Populasi yang Mendapatkan Akses yang Nyaman pada Transportasi Publik di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020 (persen).....	27
Gambar 35 Keterlibatan Perempuan di Parlemen (DPR dan DPRD) di Indonesia dan Provinsi Kalimantan Selatan, 2019-2022..	30
Gambar 36 Persentase Anak yang Memiliki Akta Kelahiran dan Proporsi Anak Umur di Bawah 5 Tahun yang Kelahirannya Dicatat oleh Lembaga Pencatatan Sipil di Provinsi Kalimantan Selatan, 2019-2022 (persen).....	30
Gambar 37 Penduduk Berusia 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet di Provinsi Kalimantan Selatan, 2023 (persen).....	31
Gambar 38 Persentase Konsumen yang Puas terhadap Kualitas Data BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2023 (persen).....	31

TENTANG SDGs

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



Agenda pembangunan universal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals (SDGs)* telah disepakati dan diimplementasikan oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Belajar dari pengalaman agenda pembangunan milenium (MDGs) pada tahun 2015 lalu, kini Indonesia berusaha menghindari keterlambatan pengimplementasian SDGs.

Banyak hal yang telah pemerintah lakukan dalam rangka membumikan TPB sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia, seperti melakukan pertemuan dengan seluruh *stakeholder* terkait, menetapkan penetapan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pencapaian Pelaksanaan TPB/SDGs, membakukan metadata TPB, menyusun pedoman teknis terkait Rencana Aksi Nasional (RAN), menyusun Rencana Aksi Nasional, menyusun Peta Jalan (*Road Map*), dan berbagai kegiatan lainnya.

Sudah sejak beberapa tahun terakhir dunia mengadopsi tujuan dan target SDGs kedalam rencana pembangunan negara masing-masing. Namun berdasarkan beberapa laporan yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga internasional, *progress* yang dilakukan oleh negara-negara dunia belum seperti yang diinginkan. Misalnya, menurut Laporan yang dikeluarkan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (2018) dan Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES 2019) menyebutkan bahwa satu juta spesies terancam punah, dan IPBES menambahkan bahwa “kita (manusia) mengikis habis pondasi yang paling dasar dari ekonomi, mata pencaharian, keamanan pangan, kesehatan, dan kualitas hidup kita di seluruh dunia”.

Sustainable Development Report (2019) juga menyebutkan bahwa negara-negara maju dan berpenghasilan tinggi justru berada pada peringkat terburuk pada Tujuan 14 (Ekosistem Lautan) dan Tujuan 15 (Ekosistem Daratan) SDGs.



Kompleksitas SDGs telah membuat pemerintah, organisasi internasional, dan pemangku kepentingan melaksanakan pengukuran kemajuan pencapaian SDGs, sehingga *stakeholder* SDGs dapat memonitor dan mengevaluasi program dan kegiatan terkait SDGs tersebut. Selain itu, juga bertujuan untuk memantau kemajuan pencapaian SDGs lintas waktu dan antar daerah; mengukur kemajuan pencapaian target dengan menggunakan indikator yang telah ditentukan; mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang mungkin terjadi, sehingga tindakan pencegahan atau perbaikan dapat dilakukan sedini mungkin.

Sedangkan, tujuan evaluasi adalah untuk memberikan gambaran tentang capaian SDGs dan menganalisis masalah dan penyebabnya, sehingga hasil evaluasi menjadi umpan balik bagi perbaikan kebijakan perencanaan, program dan kegiatan khususnya yang berkaitan dengan SDGs mendatang.

Capaian Indeks SDGs Indonesia tahun 2023 telah menunjukkan hasil capaian yang meningkat dari waktu sebelumnya, yaitu sebesar 70,2 (naik dari peringkat 82 ke 75 dari 166 negara).

Dinamika dalam pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan merupakan tantangan dalam upaya mencapai tujuan SDGs. Oleh karena itu, perlu adanya strategi yang dapat mengoptimalkan seluruh sumber daya serta mensinergikan seluruh *stakeholder* agar dapat mengubah tantangan tersebut menjadi peluang yang pada akhirnya tercapainya tujuan SDGs yang telah ditetapkan.

Saat ini, pelaksanaan TPB/SDGs telah memasuki *Decade of Action* dan hanya tersisa waktu enam tahun untuk mencapai Agenda 2030. Ketersediaan data yang lengkap dan kontinu juga mutlak diperlukan untuk mendukung keberhasilan pencapaian pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia. Terkait hal tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) berkomitmen dalam penyediaan data dan informasi yang berkualitas dan berkelanjutan untuk mendukung pencapaian TPB/SDGs di Indonesia.

17 TUJUAN SDGs

Secara umum, untuk mencapai seluruh tujuan SDGs, selain membutuhkan biaya yang sangat besar dan harus didukung oleh *political will*, juga memerlukan komitmen yang sangat kuat tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari seluruh *stakeholder* yang terlibat. Istilah Sustainable Development Goals (SDGs) tersebut telah diterjemahkan secara resmi ke dalam bahasa Indonesia menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda pembangunan global yang disepakati oleh negara-negara di dunia untuk kebaikan bersama dan planet bumi yang ditetapkan sebagai tujuan pembangunan hingga 2030. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs yang kita kenal sekarang ini merupakan hasil kerjasama puluhan tahun negara-negara, pakar-pakar, PBB, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk menyusun kesepakatan dan tujuan bersama.

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



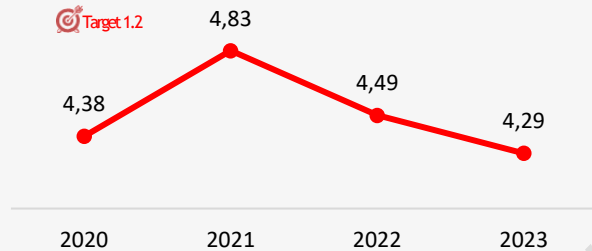
TPB mencakup 17 tujuan, yaitu:

- (1) Tanpa Kemiskinan;
- (2) Tanpa Kelaparan;
- (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
- (4) Pendidikan Berkualitas;
- (5) Kesetaraan Gender;
- (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak;
- (7) Energi Bersih dan Terjangkau;
- (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
- (9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur;
- (10) Berkurangnya Kesenjangan;
- (11) Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan;
- (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
- (13) Penanganan Perubahan Iklim;
- (14) Ekosistem Lautan;
- (15) Ekosistem Daratan;
- (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
- (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.



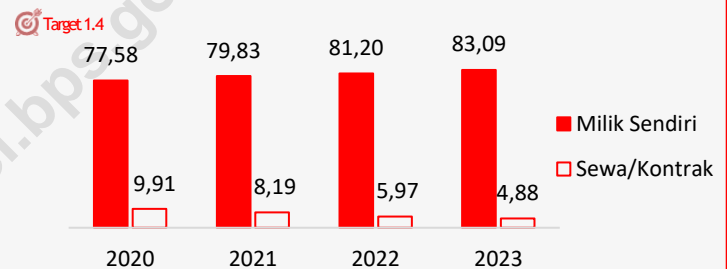
MENGAKHIRI SEGALA BENTUK KEMISKINAN DIMANAPUN

Salah satu tujuan yang dicanangkan oleh pemerintah dalam agenda SDGs di Indonesia yaitu pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk menghapus segala bentuk kemiskinan pada tahun 2030. Target yang ingin dicapai pada tahun 2030 ini mensyaratkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki akses terhadap pelayanan dasar dan memiliki hak untuk menikmati suatu standar kehidupan yang layak serta pemerintah harus dapat menjamin masyarakat yang sangat miskin dengan suatu program jaminan sosial.



Gambar 1 Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Nasional di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2023 (persen)

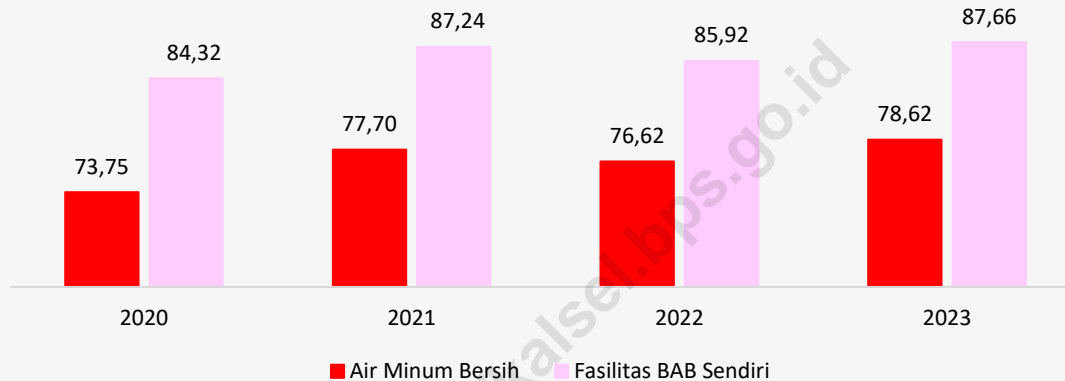
Kemiskinan menjadi masalah yang kompleks dan multidimensi. Kemiskinan berkaitan erat dengan kesempatan dan kesejahteraan. Sehingga, mengurangi dan menghilangkan kemiskinan dan kelaparan menjadi tulang punggung dari agenda SDGs. Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 sebesar 4,29 persen, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 4,49 persen. Pemulihan ekonomi pasca Covid-19 pada tahun 2022 sejalan dengan perkembangan pengurangan kemiskinan yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pemberian bantuan sosial dan penanganan bencana akibat perubahan iklim menjadi upaya untuk menangani kemiskinan di Indonesia.



Gambar 2 Proporsi Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2023 (persen)

Secara keseluruhan, proporsi rumah tangga di Provinsi Kalimantan Selatan yang menempati rumah milik sendiri jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang menyewa/mengontrak rumah. Pada periode 2020-2023, rumah tangga di Provinsi Kalimantan Selatan yang menempati rumah milik sendiri terus menunjukkan tren peningkatan. Sebaliknya, jika dibandingkan dengan tren rumah tangga yang menempati rumah sewa/kontrak justru mengalami penurunan. Hal ini menandakan bahwa akses untuk kepemilikan rumah sudah lebih baik jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Sumber: Badan Pusat Statistik



Gambar 3 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Terhadap Layanan Air Minum Bersih dan Fasilitas Buang Air Besar Sendiri di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2023 (persen)

Sumber air minum bersih adalah sumber air minum yang terdiri dari air kemasan, air isi ulang, leding dan [(sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung) dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat ≥ 10 m]. Sedangkan fasilitas buang air besar sendiri adalah fasilitas buang air besar yang digunakan sendiri oleh suatu rumah tangga (bukan digunakan secara bersama dengan rumah tangga lain maupun secara umum).

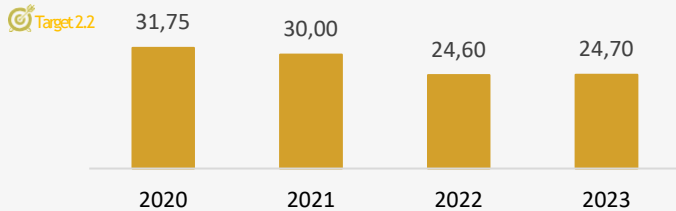
Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap layanan air minum bersih dan kepemilikan fasilitas buang air besar sendiri di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan peningkatan pada periode 2023. Pada tahun 2023, proporsi rumah tangga dengan akses terhadap layanan air minum bersih mencapai 78,62 persen, dan proporsi rumah tangga dengan kepemilikan fasilitas buang air besar sendiri mencapai 87,66 persen.





MENGHILANGKAN
KELAPARAN, MENCAPAI
KETAHANAN PANGAN
DAN GIZI YANG BAIK,
SERTA MENINGKATKAN
PERTANIAN
BERKELANJUTAN

Pada tahun 2030 tujuan 2 mengupayakan untuk menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Tujuan ini memberikan jaminan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dan menjamin akses yang sama bagi semua orang. Khususnya masyarakat yang dalam kondisi rentan, misalnya masyarakat miskin, termasuk juga bayi, anak-anak, ibu hamil dan menyusui, manula, dan sebagainya, harus bebas dari kelaparan dan memperoleh ketahanan pangan dan gizi yang baik dan berkelanjutan.



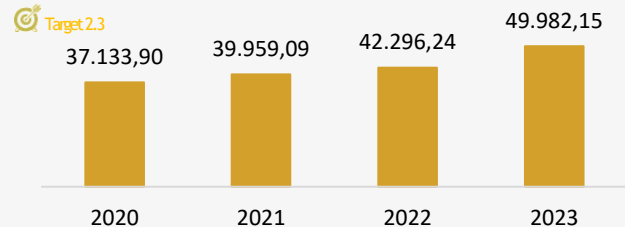
Gambar 4 Prevalensi Balita *Stunting* di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2023 (persen)

Stunting (pendek dan sangat pendek) atau tengkes pada balita merupakan kondisi kurang gizi kronis pada anak berusia 0-59 bulan yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U). Jika diperhatikan perkembangan *stunting* di Kalimantan Selatan pada periode 2021-2022, terlihat bahwa terjadi penurunan prevalensi balita *stunted*.

Angka yang diperoleh dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tersebut menunjukkan bahwa prevalensi balita *stunted* pada tahun 2021 yang sebesar 30,0 persen menurun menjadi 24,6 persen pada tahun 2022, dan meningkat sedikit di tahun 2023 yaitu 24,7 persen. Beberapa faktor penyebab kenaikan adalah perilaku hidup bersih masyarakat. Di sisi lain, target pemerintah untuk prevalensi *stunting* pada tahun 2024 yaitu sebesar 14 persen menuntut untuk dilakukan akselerasi penurunan prevalensi sehingga memerlukan adanya inovasi-inovasi di bidang kesehatan terutama masalah gizi.

Nilai tambah pertanian per tenaga kerja memberikan gambaran tentang produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian. Semakin besar pendapatan atau penghasilan tenaga kerja/petani maka semakin besar kemampuan tenaga kerja untuk mengakses pangan dengan pola gizi seimbang.

Nilai tambah pertanian per tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Nilai tambah pertanian per tenaga kerja mencapai sekitar 40 juta rupiah pada tahun 2021, meningkat menjadi 42,3 juta rupiah pada tahun 2022, dan 50 juta pada tahun 2023. Geliat ekonomi pada periode 2021-2022 membuat Nilai Tambah Pertanian per tenaga kerja naik jika dibandingkan tahun 2020.

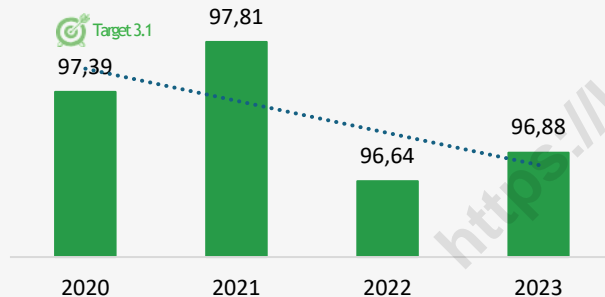


Gambar 5 Nilai Tambah Pertanian per Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2023 (ribu rupiah per orang)

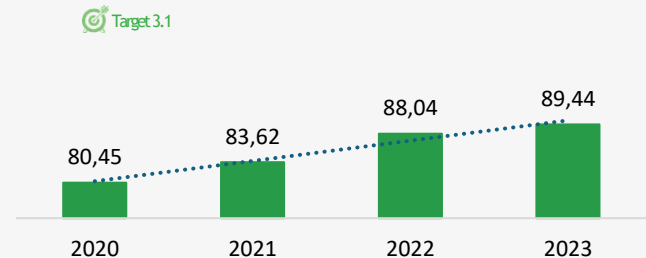


Munculnya dinamika penduduk berupa bonus demografi memberikan tantangan bagi Indonesia dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk. Meledaknya jumlah penduduk produktif serta bertambahnya penduduk usia lanjut memunculkan permasalahan beban penyakit ganda. Walaupun angka harapan hidup penduduk mengalami peningkatan, akan tetapi angka kematian akibat penyakit menular masih belum terberantas. Pola penyakit yang diderita oleh penduduk sebagian besar adalah penyakit infeksi menular. Di samping itu, Indonesia juga menghadapi *emerging disease*, yaitu suatu penyakit menular baru yang penyebarannya sangat cepat. Munculnya beban penyakit ganda dalam waktu bersamaan mengindikasikan telah terjadi transisi epidemiologi di Indonesia. Pemberantasan penyakit pun perlu dilakukan dengan kerja sama semua elemen masyarakat agar pada masa mendatang Indonesia dapat menjamin kehidupan yang sehat dan sejahtera untuk semua.

Adanya pandemi Covid-19 pada 2020 menjadi tantangan tersendiri untuk ketercapaian tujuan ini.



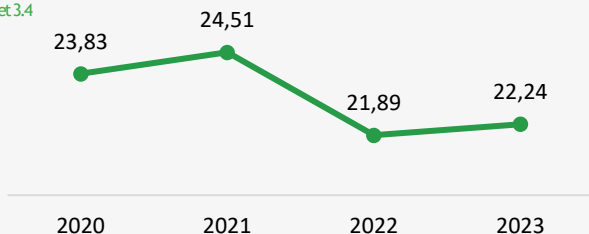
Gambar 6 Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2023 (persen)



Gambar 7 Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2023 (persen)

Pada periode 2020-2023, proporsi perempuan pernah kawin di usia produktif yang persalinannya ditolong oleh tenaga kesehatan dan dilakukan di fasilitas kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan terus mengalami kenaikan (kecuali pada periode 2021-2022 untuk persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih). Pada tahun 2023, persentase/proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dan perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan masing-masing mencapai 96,88 persen dan 89,44 persen.

Target 3.4



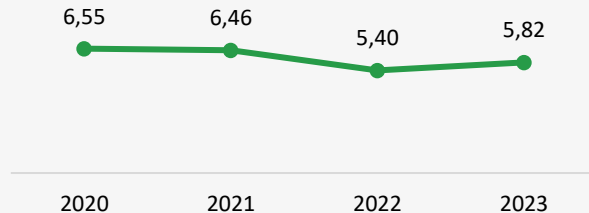
Gambar 8 Persentase Merokok pada Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2023 (persen)

Berbagai penelitian telah membuktikan ada banyak bahaya merokok bagi kesehatan. Di antaranya yaitu asma, infeksi paru-paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker paru-paru, serangan jantung, stroke, demensia, disfungsi ereksi (impotensi), dan sebagainya. Hingga tahun 2023, persentase merokok pada penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi Kalimantan Selatan masih mencapai 22,24 persen. Ini menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 5 penduduk Kalimantan Selatan usia 15 tahun ke atas merupakan perokok aktif meskipun ada yang merokok tidak setiap hari.



Unmet need pelayanan kesehatan atau persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan terganggu aktivitasnya namun tidak berobat jalan adalah perbandingan antara banyaknya penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan terganggu aktivitasnya, namun tidak berobat jalan dan jumlah penduduk. Aktivitas yang dimaksud adalah aktivitas penduduk sehari-hari seperti bekerja, bersekolah atau kegiatan sehari-hari lainnya. *Unmet need* merupakan indikator *proxy* untuk melihat cakupan penduduk yang seharusnya berobat karena sakit hingga mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi kenyataannya tidak berobat.

Target 3.8



Gambar 9 *Unmet Need* Pelayanan Kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2023 (persen)

Terlihat bahwa *unmet need* pelayanan kesehatan di Kalimantan Selatan sempat menunjukkan tren penurunan dalam tiga periode (2020-2022). Namun, sedikit meningkat kembali di tahun 2023 menjadi 5.82 persen. Hal tersebut perlu menjadi perhatian dikarenakan semakin besarnya persentase penduduk yang tidak berobat jalan pada saat memiliki keluhan kesehatan dan terganggu aktivitas sehari-harinya.

Sumber: Badan Pusat Statistik



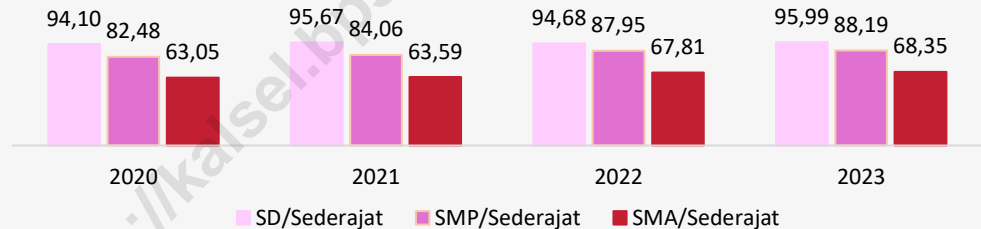
Salah satu faktor utama dan terpenting dalam pembangunan berkelanjutan yaitu pendidikan. Pendidikan memberikan pelajaran mengenai daya juang dan membangun watak anak bangsa dengan memberikan arti kejujuran, kebersamaan, kesantunan, nilai-nilai dan budi pekerti kepada anak-anak bangsa.

Angka tingkat penyelesaian pendidikan mengukur persentase anak dan remaja yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan yang sesuai dengan rentang usianya. Rentang usia yang termasuk dalam perhitungan ini adalah antara 1 sampai dengan 3 tahun sejak usia kelulusan jenjang pendidikan pada umumnya.

Pada jenjang pendidikan SD/ sederajat, tingkat penyelesaian pendidikan di Kalimantan Selatan pada tahun 2023 sudah di atas 95 persen. Sedangkan untuk SMP/ sederajat, tingkat penyelesaian pendidikan sudah di atas 85 persen. Namun, capaian pada jenjang SMA/ sederajat masih di kisaran 68 persen.

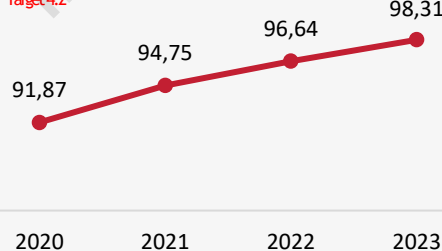
Tujuan 4 dibentuk dengan harapan untuk menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua orang. Pada tujuan ini akan disajikan gambaran pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan indikator dan data terbaru untuk melihat proses yang sedang berjalan hingga saat ini. Pendidikan berkualitas merupakan prinsip dasar pembangunan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi. Di samping itu, akses untuk memperoleh kesempatan belajar yang sama dan merata dalam setiap jenjang pendidikan selama hidup diharapkan dapat dicapai dari tujuan 4.

Target 4.1



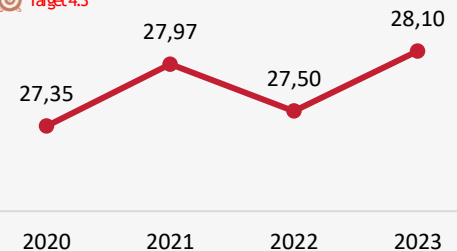
Gambar 10 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2023 (persen)

Target 4.2



Gambar 11 Tingkat Partisipasi Dalam Pembelajaran yang Terorganisir (Satu Tahun Sebelum Usia SD) di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2023 (persen)

Target 4.3



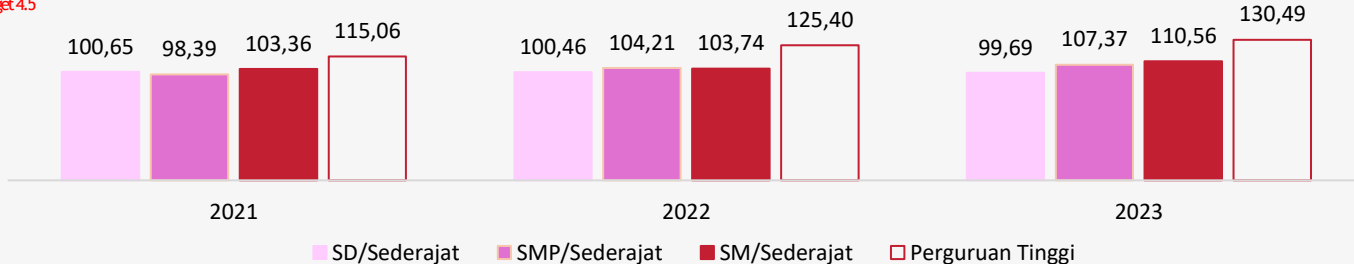
Gambar 12 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2023 (persen)

Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar) mengukur angka partisipasi anak usia 6 tahun (satu tahun sebelum usia resmi masuk Sekolah Dasar) dalam program pendidikan yang terorganisir, yang mencakup Pendidikan Anak Usia Dini maupun anak-anak yang sudah memasuki jenjang Sekolah Dasar/ sederajat sebelum berumur 6 tahun. Pada tahun 2023, capaian indikator ini terus meningkat sejak tahun 2020 yakni 98,31 persen.

APK Perguruan Tinggi (PT) adalah perbandingan antara jumlah mahasiswa pada jenjang Pendidikan D1/D2/D3/D4/S1/S2 dengan jumlah penduduk usia 19–23 tahun. Secara umum, Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022. APK Perguruan Tinggi di Kalimantan Selatan pada tahun 2023 mencapai 28,10 persen.

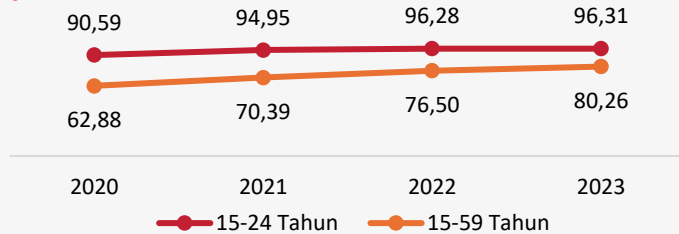
Rasio Angka Pendidikan Murni (APM) ditujukan untuk melihat kesenjangan atau disparitas antar kelompok dalam mengakses pendidikan. Semakin mendekati 100, berarti kesenjangan antara kedua kelompok tersebut dalam mengakses pendidikan juga semakin mengecil.

Rasio APM perempuan/laki-laki pada jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi pada tahun 2023 hampir seluruhnya melebihi angka 100. Ini menunjukkan bahwa pada jenjang pendidikan tersebut, terdapat kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal kesempatan akses pendidikan, dimana kesempatan bagi laki-laki lebih rendah jika dibandingkan dengan perempuan. Meskipun demikian, rasio APM pada jenjang SMP sederajat di tahun 2021 dan jenjang SD sederajat di tahun 2023 masih relatif mendekati nilai 100 yakni masing-masing 98,39 dan 99,69.



Gambar 13 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki Menurut

Jenjang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan, 2021-2023



Gambar 14 Proporsi Remaja (15-24 Tahun) dan Dewasa (15-59 Tahun) dengan Keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2023 (persen)

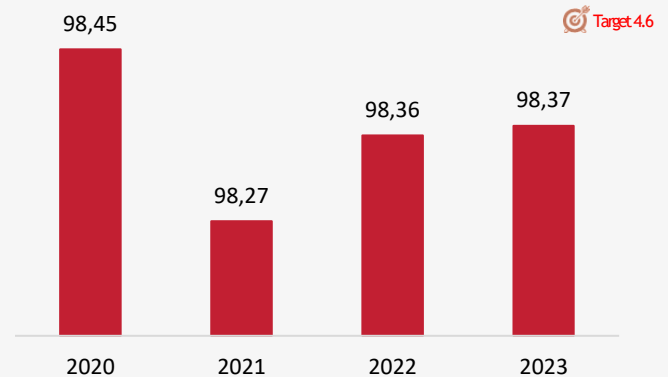
Proporsi penduduk remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi menunjukkan besaran proporsi remaja (umur 15-24 tahun) dan dewasa (umur 15-59 tahun) yang telah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan komputer tertentu dalam suatu periode waktu tertentu (tiga bulan terakhir). Komputer dalam hal ini hanya mengacu pada komputer desktop, laptop, atau tablet. Peralatan dengan beberapa kemampuan komputasi seperti *smart TV*, dan perangkat telepon sebagai fungsi utamanya, seperti *smartphone*, tidak tercakup dalam definisi yang dimaksud.

Pada periode 2020-2023 di Provinsi Kalimantan Selatan, capaian pada indikator ini mengalami peningkatan setiap tahunnya, baik pada kelompok penduduk remaja maupun dewasa. Bahkan pada penduduk remaja, capaiannya sudah mencapai 96,31 persen pada tahun 2023.

Meningkatnya capaian pada indikator ini diharapkan dapat meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.

Persentase angka melek aksara/huruf (AMH) penduduk umur 15 tahun ke atas adalah perbandingan jumlah penduduk berumur 15 tahun yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya, terhadap jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas.

Angka melek aksara di Kalimantan Selatan pada tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2021 dan 2022. Naik sedikit menjadi 98,37 persen pada tahun 2023, setelah sebelumnya mencapai 98,36 persen pada tahun 2022. Meskipun kenaikannya tidak signifikan, hendaknya momentum kenaikan ini terus berlanjut dalam rangka mengentaskan buta aksara.



Gambar 15 Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2023 (persen)

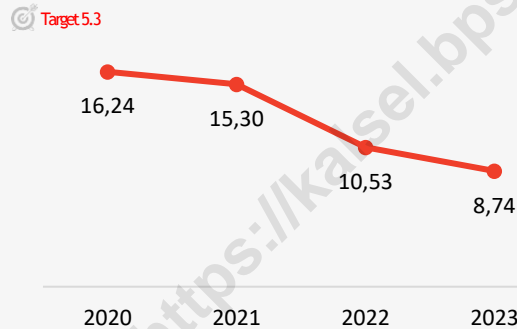


**MENCAPAI
KESETARAAN
GENDER DAN
MEMBERDAYAKAN
KAUM PEREMPUAN**

Konsep kesetaraan gender atau dapat disebut sebagai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan mempunyai makna adanya keadilan dalam hal pemenuhan hak-hak, kesempatan dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan untuk semua kelompok umur dalam segala bidang kehidupan.

Proporsi perempuan berumur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 turun menjadi 8,74 persen dibandingkan tahun 2022 (10,53 persen). Angka tersebut juga lebih rendah jika dibandingkan tahun 2020 (15,30 persen). Indikator ini sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan untuk perlindungan anak dari perkawinan usia dini dan pengendalian jumlah penduduk.

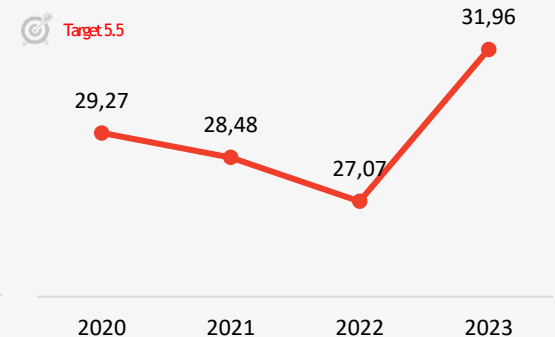
Kesetaraan gender tidak hanya merupakan hak asasi manusia yang mendasar, namun merupakan dasar penting bagi dunia yang damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Tujuan 5 memiliki maksud untuk meningkatkan pemberdayaan kaum perempuan dalam mengembangkan bakat dan potensinya sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki. Hal ini berarti diskriminasi dan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Selain itu, pembangunan yang adil dan berkelanjutan harus menjamin akses perempuan dan anak perempuan terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, pekerjaan yang layak, bermasyarakat, serta memiliki hak membuat keputusan dalam bidang politik.



Gambar 16 Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2023 (persen)

Jumlah perempuan sebagai tenaga manager per 100 tenaga manager pada tahun 2023 di Kalimantan Selatan meningkat dibandingkan tahun 2022, yang semula sebesar 27,07 persen pada tahun 2022 menjadi 31,96 persen pada 2023. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, capaian pada tahun 2023 masih lebih besar yang menunjukkan semakin banyak perempuan yang berpartisipasi dan turut mendapat kesempatan dalam jabatan kepemimpinan.

Sumber: Badan Pusat Statistik



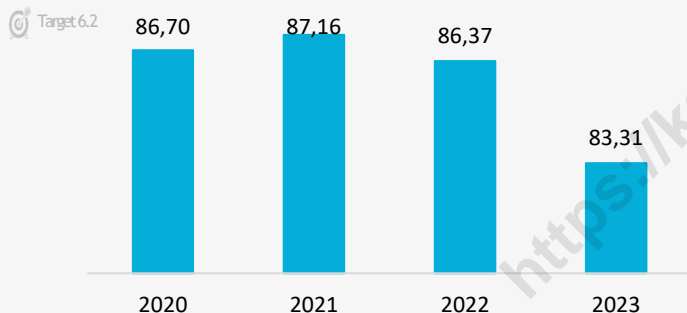
Gambar 17 Proporsi Perempuan yang Berada di Posisi Manajerial di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2023 (persen)



**MENJAMIN
KETERSEDIAAN SERTA
PENGELOLAAN AIR
BERSIH DAN SANITASI
YANG BERKELANJUTAN
UNTUK SEMUA**

Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi. Sekjen PBB menetapkan 27 Panel Tingkat Tinggi pada bulan Juli 2012. Panel Tingkat Tinggi merupakan kemitraan global yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan dan mengubah perekonomian melalui pembangunan berkelanjutan. Fokus utamanya ada pada ketersediaan pangan, air bersih, dan energi yang

merupakan dasar dari kehidupan. Perubahan yang paling penting dalam konsumsi berkelanjutan dan produksi akan didorong oleh teknologi, inovasi, desain produk, pedoman kebijakan yang terperinci, pendidikan, dan perubahan perilaku. Panel mengusulkan dua belas *Universal Goals* dan Nasional Target. Target tersebut menyerukan pada negara-negara untuk “Mencapai *universal access* dalam sektor air minum dan sanitasi” yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030.

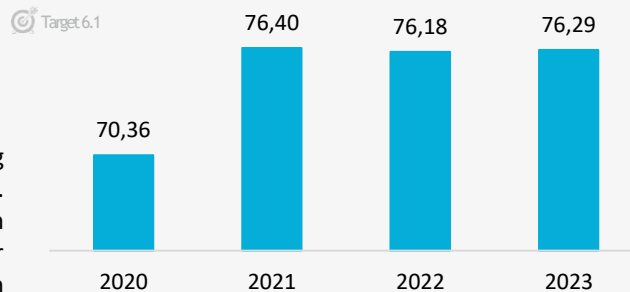


Gambar 18 Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Cuci Tangan dengan Sabun dan Air di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2023 (persen)

Akses air minum layak adalah jika sumber air minum utama yang digunakan rumah tangga adalah leding, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindungi, dan mata air terlindungi. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak, jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindungi, mata air terlindungi, dan air hujan.

Sumber: Badan Pusat Statistik

Hingga tahun 2023, masih terdapat sekitar 23,71 persen rumah tangga di Provinsi Kalimantan Selatan yang belum memiliki akses ke layanan sumber air minum layak. Selain itu, sebanyak 16,69 persen populasi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 masih belum memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. Kebiasaan mencuci tangan dengan sabun harus dibangun mulai dari tempat tinggal. Terlebih lagi ketika pandemi Covid-19 melanda, kebiasaan mencuci tangan dengan sabun dan air yang bersih sangat digalakkan.



Gambar 19 Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2023 (persen)



Rasio elektrifikasi diperoleh dengan cara membagi jumlah pelanggan rumah tangga baik dari PLN maupun non-PLN dengan total rumah tangga dikali dengan 100 persen. Rasio penggunaan gas rumah tangga merupakan indikator yang berguna untuk melihat proporsi rumah tangga yang telah memanfaatkan gas sebagai bahan bakar untuk memasak dibanding total rumah tangga secara keseluruhan.

Pada periode 2020-2023, rasio elektrifikasi di Kalimantan Selatan relatif stabil, yakni berada di kisaran angka 99,99 persen.

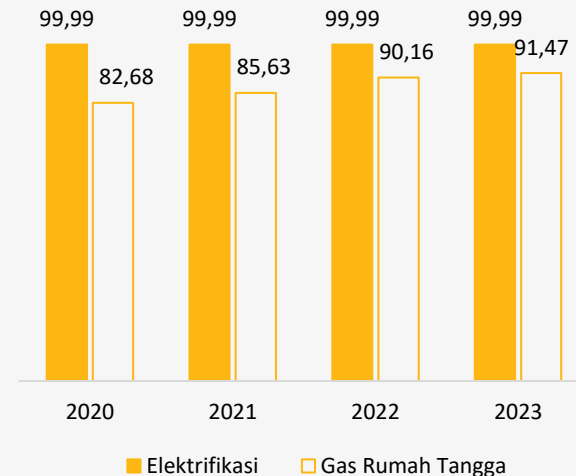


Sementara itu, rasio penggunaan gas rumah tangga di Kalimantan Selatan pada tahun 2023 (91,47 persen) mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022 (90,16 persen), dan juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2020 (82,68 persen).

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian ESDM

Pembangunan ekonomi yang inklusif adalah cara paling efektif untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Namun, sebagian besar kegiatan ekonomi mustahil dilakukan tanpa tersedianya energi modern yang cukup, handal, dan memiliki harga yang kompetitif. Energi dan cara menggunakannya harus efisien, berkelanjutan dan sebisa mungkin terbarukan. Dalam 20 tahun terakhir, beberapa negara telah melakukan langkah besar dalam mengurangi intensitas energi. Apabila semua teknologi efisiensi energi yang tersedia saat ini diterapkan, konsumsi energi secara signifikan bisa dipangkas menjadi sekitar sepertiga. Namun hanya sebagian kecil dari potensi ini yang terealisasi. Melalui kombinasi beberapa teknologi efisiensi energi, desain bangunan yang baik, dan teknologi atap terbarukan yang baru, gedung *zero net energy* sudah bisa dibangun. Dalam banyak kasus, gedung-gedung tersebut menghasilkan tenaga matahari yang dialirkan ke dalam jaringan untuk dipakai pihak lain. Selain menerapkan efisiensi energi, reformasi kebijakan dan penghapusan subsidi, negara-negara perlu juga memastikan bahwa terjadi peralihan dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan.

Target 7.1



Gambar 20 Rasio Elektrifikasi dan Penggunaan Gas Rumah Tangga di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2023

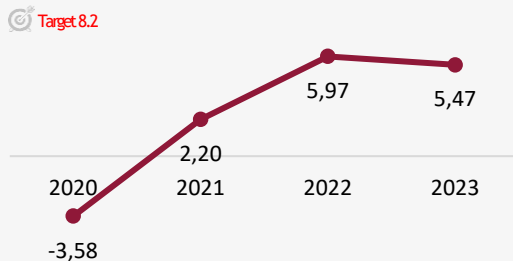


MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA

Perubahan Indonesia sebagai *Middle-Upper Country* menjadi *Middle-Lower* oleh Bank Dunia pada Juli 2021 merupakan imbas dari pandemi Covid-19.

Di Provinsi Kalimantan Selatan sendiri, PDRB per kapita pada periode 2020-2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, PDRB per kapita Kalimantan Selatan mencapai 44,1 juta rupiah atas dasar harga berlaku (ADHB). Pada tahun 2020, walaupun terjadi pandemi Covid-19 yang juga turut berimbas pada perekonomian di Kalimantan Selatan pada tahun tersebut, PDRB per kapita masih menunjukkan adanya peningkatan yang berlanjut pada periode 2021-2023 dimana perekonomian perlahan sudah mulai bangkit. Secara riil, terlihat peningkatan pesat laju pertumbuhan PDRB per kapita dalam periode 2020-2022 dikarenakan adanya pemulihan pasca pandemi Covid-19. Laju ini berangsur turun kembali pada tahun 2023.

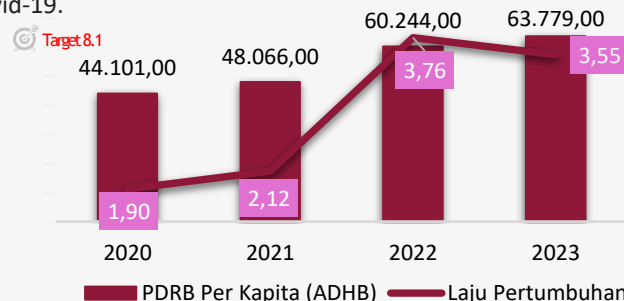
PDRB per tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 tumbuh sebesar 5,47 persen, setelah tahun sebelumnya mengalami kenaikan signifikan seiring dengan dibebaskannya masyarakat beraktivitas pasca pandemi-Covid 19. Apabila dilihat tren 4 tahun terakhir, mengindikasikan terjadinya peningkatan tingkat produktivitas tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi di Kalimantan Selatan yang juga sebagai tanda pemulihan dari pandemi Covid-19.



Gambar 21 Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2023 (persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pola pertumbuhan ekonomi saat ini sangat tergantung pada SDA yang melimpah dan upah tenaga kerja yang murah. Sektor pariwisata diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal sebagai salah satu solusi dalam mencapai pola pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif (*inclusive growth*), ramah lingkungan, dan berkelanjutan (*green growth*). Pertumbuhan yang inklusif didefinisikan sebagai pertumbuhan yang menjamin akses yang adil bagi seluruh anggota masyarakat terhadap peluang ekonomi yang tercipta, sedangkan pertumbuhan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan adalah strategi pertumbuhan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan dan ekosistem dalam jangka panjang.

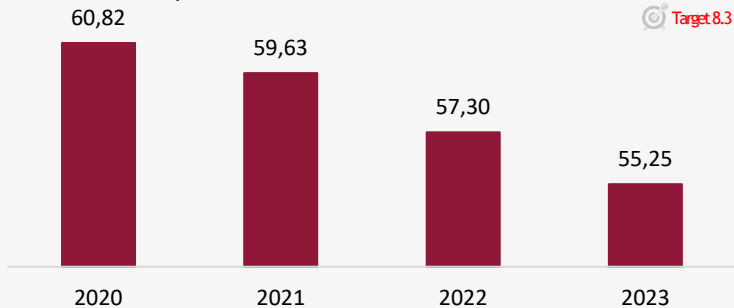


Gambar 22 PDRB ADHB per Kapita per Tahun (ribu rupiah) dan Laju Pertumbuhan PDRB ADHB per Kapita (persen) di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2023

Pekerja informal adalah penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar. Proporsi penduduk yang memiliki pekerjaan pada kegiatan informal dapat digunakan sebagai proksi proporsi pekerja yang tidak memiliki kondisi kerja yang terlindungi. Hingga tahun 2023, persentase tenaga kerja informal di Kalimantan Selatan masih relatif tinggi, yaitu sebesar 55,25 persen. Angka tersebut menurun dari keadaan tahun 2022, yaitu sebesar 57,30 persen. Demikian pula jika dibandingkan dengan tahun 2020, proporsi tenaga kerja informal pada tahun 2023 relatif menurun.

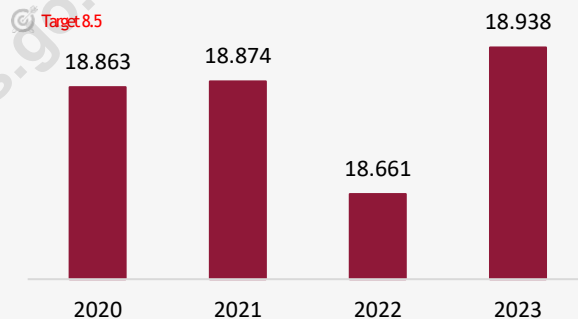
Upah rata-rata per jam kerja merupakan imbalan atau penghasilan rata-rata yang diperoleh per jam, baik berupa uang maupun barang. Upah dapat menggambarkan kualitas pekerjaan dan kondisi kehidupan seseorang. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2020-2023), upah rata-rata per jam pekerja di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami kenaikan setiap tahun, kecuali pada tahun 2022 yang mengalami sedikit penurunan.

Penduduk usia muda yang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (*youth not in education, employment or training* atau NEET) adalah anak muda yang melakukan kegiatan lain di luar sekolah, bekerja, atau pelatihan. Hingga tahun 2023, terdapat sebanyak 21,17 persen penduduk usia muda di Kalimantan Selatan yang menyandang gelar NEET. Artinya, sekitar 1 dari 5 penduduk usia muda di Kalimantan Selatan merupakan seorang NEET, alias tidak terberdayakan.

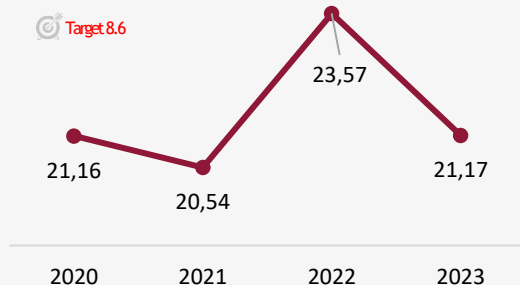


Gambar 23 Proporsi Tenaga Kerja Informal di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2023 (persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik

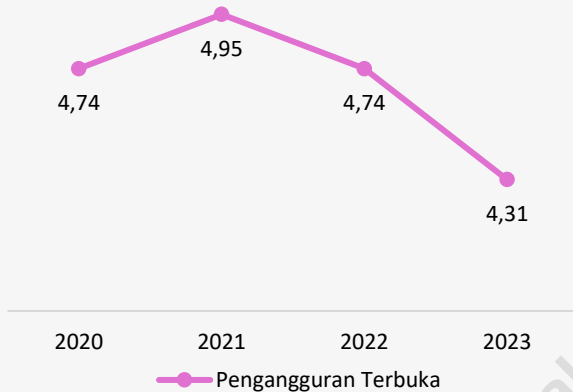


Gambar 24 Upah Rata-Rata per Jam Pekerja di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2023 (rupiah)



Gambar 25 Persentase Penduduk Usia Muda (15-24 Tahun) yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja, atau Mengikuti Pelatihan di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2023 (persen)

Target 8.5



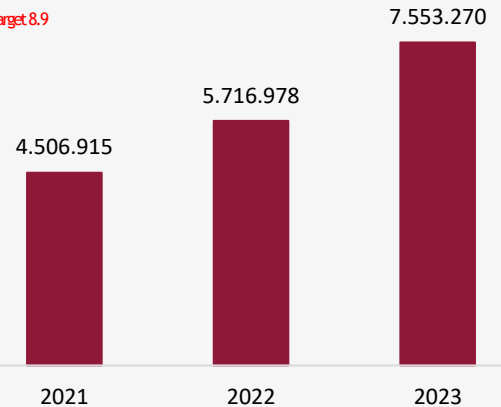
Gambar 26 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Setengah Pengangguran di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2023 (persen)

Pandemi Covid-19 menjadi penyebab utama meningkatnya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Selatan pada tahun 2020 dan 2021 jika dibandingkan dengan periode beberapa tahun ke belakang. Pada tahun 2023, pengangguran terbuka mengalami penurunan dibanding tahun 2022. Meredanya pandemi Covid-19 membuat roda perekonomian kembali berjalan normal dan penyerapan tenaga kerja turut mengalami peningkatan.

Sejak Tahun 2019, metode penghitungan jumlah kunjungan wisatawan nusantara menggunakan Metode *Mobile Positioning Data* (MPD). Dari data tersebut, diperoleh jumlah perjalanan wisatawan nusantara di Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Meredanya pandemi Covid-19 dan pencabutan pembatasan mobilitas penduduk serta dibukanya lokasi-lokasi wisata, turut berdampak pada meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara.



Target 8.9



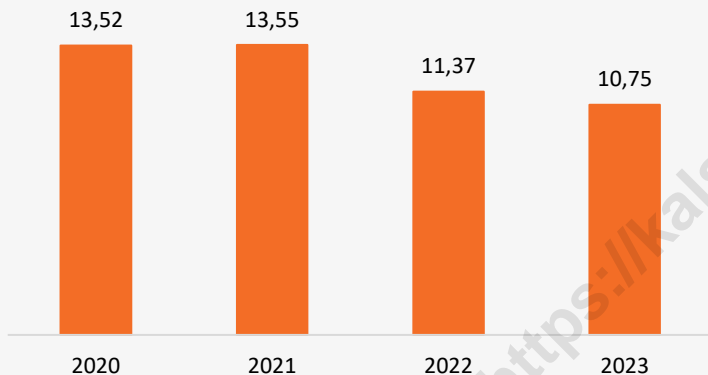
Gambar 27 Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara di Provinsi Kalimantan Selatan, 2021-2023 (orang)

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif



Pembangunan berkelanjutan tujuan 9 mengandung tiga aspek penting dari pembangunan berkelanjutan, yaitu: infrastruktur, industrialisasi, dan inovasi. Infrastruktur menyediakan fasilitas fisik dasar yang penting untuk bisnis dan masyarakat; industrialisasi mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sehingga mengurangi ketimpangan pendapatan; dan inovasi memperluas kemampuan teknologi sektor industri dan mengarah pada pengembangan keterampilan baru.

Target 9.2



Gambar 28 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan terhadap Total PDRB Kalimantan Selatan, 2020-2023 (persen)

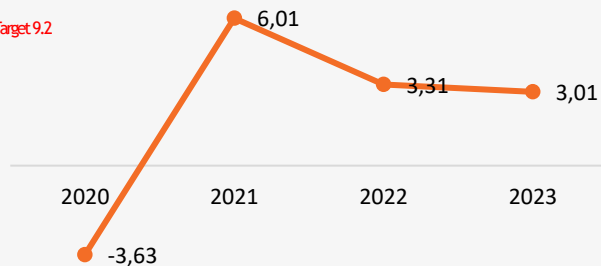
Industri pengolahan atau industri manufaktur secara luas didefinisikan sebagai transformasi bahan fisik atau kimia menjadi produk baru, terlepas dari proses (dengan mesin atau dengan tangan), lokasi (pabrik atau rumah), atau metode penjualan (grosir atau eceran).

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022, bahkan lebih rendah dari capaian tahun 2020. Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 hanya sebesar 10,75 persen. Ini berarti, output dari industri pengolahan

belum mampu berkontribusi secara maksimal dalam mendukung perekonomian Kalimantan Selatan, mengingat masih sangat bergantungnya PDRB Provinsi Kalimantan Selatan dengan sektor pertambangan, khususnya batubara.

Laju pertumbuhan PDRB industri pengolahan di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 sebesar 3,01 persen, sedikit menurun jika dibandingkan tahun 2022 sebesar 3,31 persen. Laju pertumbuhan ini sempat berkontraksi sebesar 3,63 persen pada tahun 2020 imbas pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, laju pertumbuhannya meningkat pesat sebesar 6,01 persen seiring dengan pemulihan pasca pandemic Covid-19.

Target 9.2



Gambar 29 Laju Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2023 (persen)



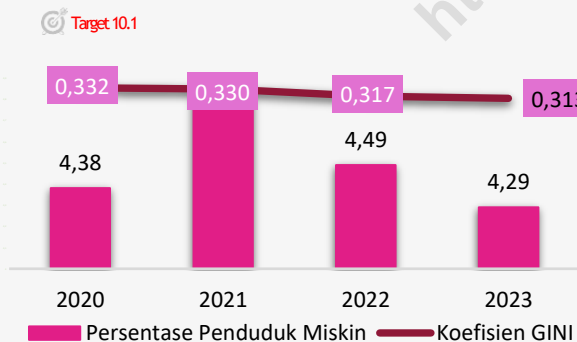
MENGURANGI KESEJANGKAN INTRA DAN ANTAR NEGARA

Tujuan 10 bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan berdasarkan usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, etnis, asal, agama, status ekonomi, atau status lainnya di suatu negara. Tujuan ini juga membahas kesenjangan antar negara, termasuk yang terkait dengan perwakilan, migrasi, dan bantuan pembangunan. Hal ini melibatkan perbaikan peraturan dan pemantauan pasar keuangan dan institusi, mendorong bantuan pembangunan dan investasi langsung asing ke daerah-daerah dimana kebutuhannya paling besar. Tujuan 10 juga membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan representasi dari wilayah-wilayah berkembang dalam pengambilan keputusan dan bantuan pembangunan oleh pemangku kepentingan dan berbagai pihak terkait.

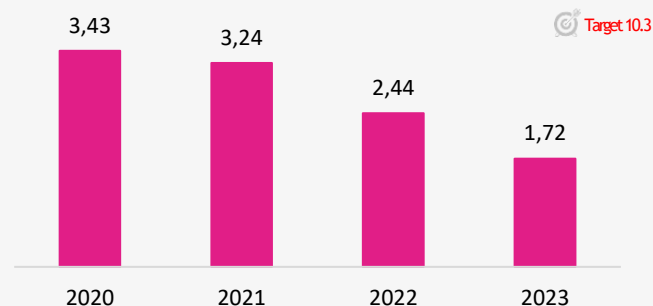
Kesenjangan yang terjadi akan mengancam pembangunan dalam jangka panjang, baik

dari sisi sosial maupun ekonomi. Kesenjangan juga akan mengganggu penurunan kemiskinan dan apabila dibiarkan akan menimbulkan tindak kriminal dan kerusakan lingkungan.

Pada periode 2020-2023 di Kalimantan Selatan, koefisien gini dan persentase penduduk miskin menunjukkan tren yang berbeda. Di satu sisi kondisi ketimpangan pendapatan menunjukkan tren yang menurun yang berarti ada perbaikan kesenjangan di Kalimantan Selatan. Di sisi lain, persentase penduduk miskin menunjukkan pola yang cukup fluktuatif. Oleh karena itu perlu adanya adopsi kebijakan yang tepat untuk memberdayakan penduduk dengan pendapatan terbawah. Selain itu, proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami tren penurunan pada periode 2020-2023. Penurunan pada indikator ini mengindikasikan bahwa penduduk pada kelompok pendapatan rendah mengalami peningkatan tingkat kesejahteraan.



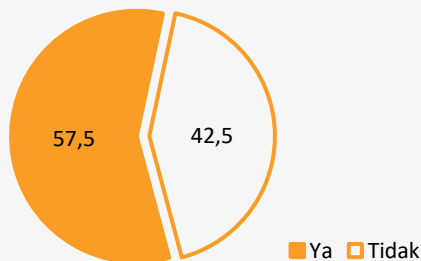
Gambar 30 Koefisien GINI dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2023



Gambar 31 Proporsi Penduduk yang Hidup di Bawah 50 Persen dari Median Pendapatan di Kalimantan Selatan, 2020-2023 (persen)

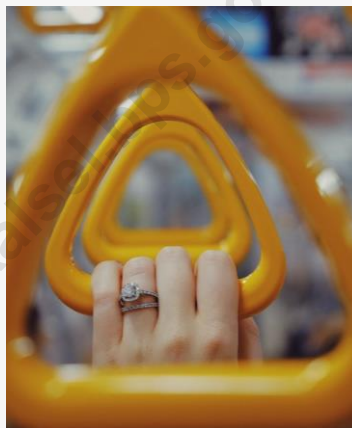
Saat ini, lebih dari setengah populasi dunia tinggal di kota. Pada tahun 2030, diproyeksikan bahwa 6 dari 10 orang merupakan penduduk kota. Meskipun banyak tantangan perencanaan, kota menawarkan ekonomi yang lebih efisien dari skala pada berbagai tingkatan, termasuk penyediaan barang, jasa, dan transportasi. Dengan suara, perencanaan, dan manajemen risiko-informasi, kota bisa menjadi inkubator untuk inovasi, pertumbuhan, dan penggerak dari pembangunan berkelanjutan.

Target 11.1

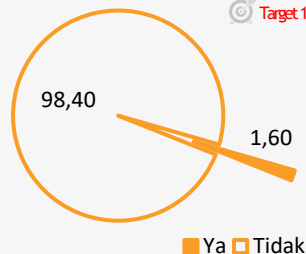


Gambar 32 Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau di Provinsi Kalimantan Selatan, 2023 (persen)

Pada tahun 2023, setidaknya masih terdapat 2 dari 5 rumah tangga di Kalimantan Selatan yang masih belum memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau. Hunian layak huni didefinisikan sebagai rumah/hunian yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuninya. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal diukur dari dua aspek, yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu jenis atap terluas, jenis dinding terluas, dan jenis lantai terluas. Kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan, dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC).



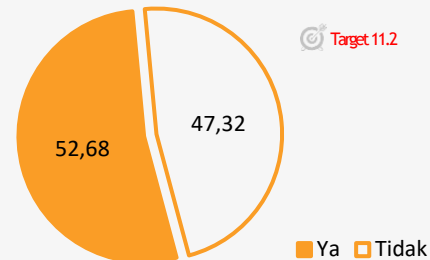
Target 11.2



Gambar 33 Proporsi Penduduk Terlayani Transportasi Publik di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik

Target 11.2



Gambar 34 Proporsi Populasi yang Mendapatkan Akses yang Nyaman pada Transportasi Publik di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020 (persen)

Akses nyaman pada transportasi publik merupakan salah satu syarat pada pembangunan perkotaan yang inklusif. Pada tahun 2020, baru 52,68 persen rumah tangga yang memiliki akses nyaman ke transportasi umum, yaitu rumah tangga dengan jarak paling jauh 0,5 km ke transportasi umum. Pada tahun yang sama, hanya terdapat sebanyak 1,60 persen penduduk berumur 10 tahun ke atas yang menggunakan kendaraan umum dengan rute tertentu.

12

KONSUMSI DAN
PRODUKSI YANG
BERTANGGUNG
JAWAB

*MENJAMIN POLA
PRODUKSI DAN
KONSUMSI YANG
BERKELANJUTAN*

Permasalahan lingkungan yang terus muncul hingga saat ini, tidak terlepas dari pola produksi dan konsumsi yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu diperlukan komitmen perubahan pada produsen dan konsumen melalui pemanfaatan sumberdaya secara efisien. Pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan merupakan upaya perwujudan perubahan secara terpadu dan sistematis dari pola sebelumnya yang tidak ramah lingkungan dan tidak berkelanjutan oleh semua pemangku kepentingan. Diharapkan pula pola produksi dan konsumsi berkelanjutan dapat memberikan multimanfaat penting berupa perubahan pola konsumsi masyarakat yang bertanggungjawab, efisien, dan ramah lingkungan.

13

PENANGANAN
PERUBAHAN IKLIM

*MENGAMBIL
TINDAKAN CEPAT
UNTUK MENGATASI
PERUBAHAN IKLIM
DAN DAMPAKNYA*

Indonesia sebagai negara kepulauan sangat rentan terkena bencana-bencana yang terkait dengan perubahan iklim. Mengingat perubahan iklim berdampak terhadap banyak sektor, maka dibutuhkan penanganan yang menyeluruh dan koordinasi yang baik antar sektor. Dengan kondisi sebagai negara berkembang, kemampuan Indonesia dalam melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim belum sebaik negara-negara maju. Dikhawatirkan pembangunan yang sedang dilaksanakan pemerintah bisa terhambat karena dampak perubahan iklim tersebut. Untuk itu, pada tujuan ini diharapkan pemerintah mengambil tindakan cepat dalam mengatasi perubahan iklim dan dampak yang terjadi dengan memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pendidikan, menumbuhkan kesadaran, kapasitas manusia, kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak, dan peringatan dini perubahan iklim.

14

EKOSISTEM
LAUTAN

*MELESTARIKAN
DAN MEMANFAATKAN
SECARA BERKELANJUTAN
SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN SAMUDERA
UNTUK PEMBANGUNAN
YANG BERKELANJUTAN*

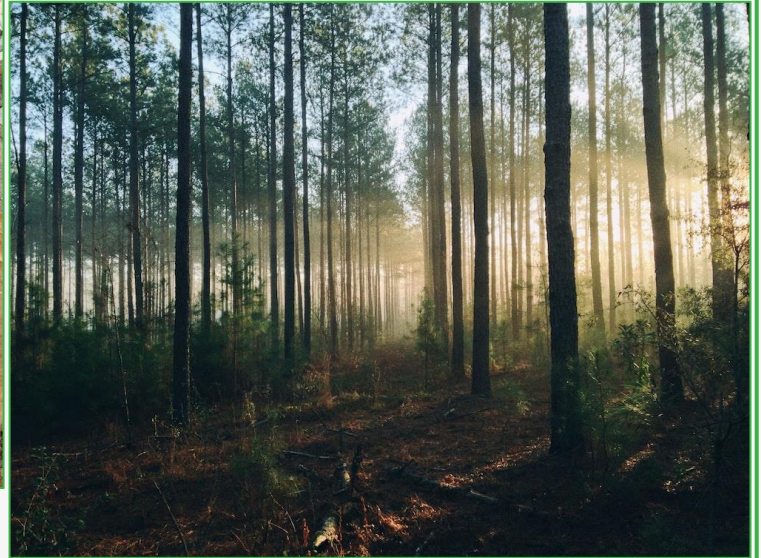
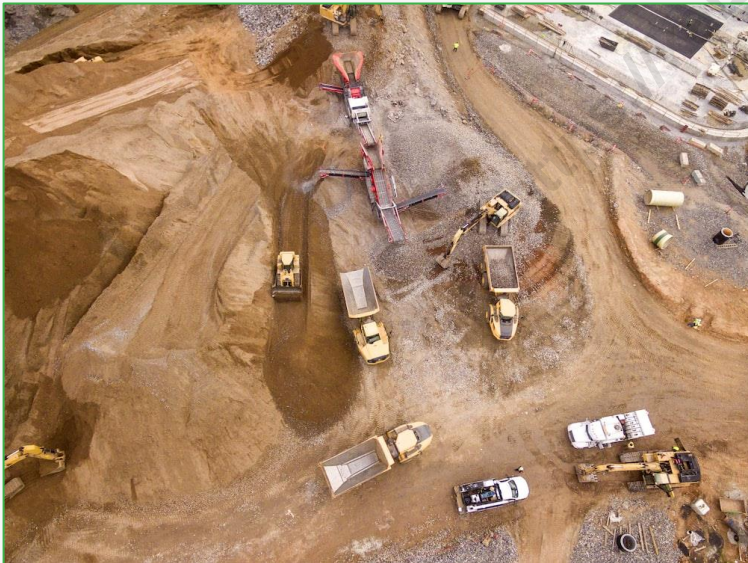
Samudera dunia (suhu, unsur kimia, arus, dan kehidupan di dalamnya) adalah penggerak sistem global yang membuat bumi bisa dihuni oleh manusia. Cara kita mengelola sumber daya yang vital ini sangat penting bagi kehidupan manusia secara keseluruhan dan untuk mengimbangi dampak dari perubahan iklim. Lebih dari 3 miliar orang menggantungkan mata pencaharian pada laut dan keanekaragaman hayati pantai. Namun, saat ini kita melihat bahwa 30 persen simpanan ikan dunia mengalami eksploitasi berlebih, jauh di bawah level di mana mereka bisa memproduksi hasil yang berkelanjutan. Samudera juga menyerap sekitar 30 persen karbon dioksida yang dihasilkan manusia, dan kita melihat kenaikan pengasaman samudera hingga 26 persen sejak dimulainya revolusi industri. Polusi laut yang mayoritas bersumber dari darat telah mencapai level yang mengkhawatirkan, dengan rata-rata 13.000 bagian sampah plastik ditemukan di setiap kilometer persegi lautan. SDGs menciptakan kerangka kerja berkelanjutan untuk mengatur dan melindungi ekosistem laut dan pantai dari polusi yang berasal dari darat, juga untuk menyadarkan akan dampak pengasaman samudera. Memperkuat perlindungan dan penggunaan sumber daya laut yang berkelanjutan melalui hukum internasional juga akan membantu mengatasi tantangan yang dihadapi samudera kita.



MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

Kehidupan manusia bergantung pada tanah sama seperti kita bergantung pada laut untuk bahan makanan dan mata pencaharian. Tumbuhan menyediakan 80 persen bahan makanan untuk manusia, dan kita bergantung pada pertanian sebagai sumber penting perekonomian dan alat pembangunan. Hutan meliputi 30 persen permukaan bumi, dan merupakan habitat bagi jutaan spesies serta menjadi sumber air dan udara bersih, dan juga sangat penting untuk melawan perubahan iklim. Belum pernah kita melihat penurunan kualitas tanah seperti saat ini, dan hilangnya

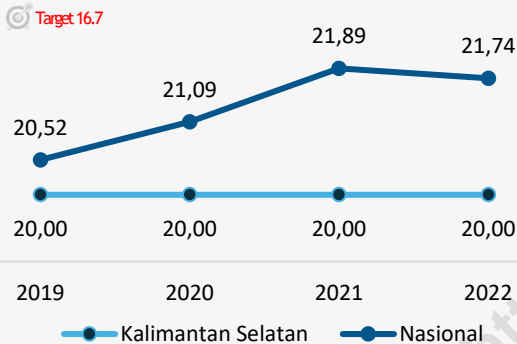
tanah yang bisa ditanami mencapai 30 hingga 35 kali jumlah rata-rata dalam sejarah. Kemarau panjang dan perubahan lahan menjadi gurun juga meningkat tiap tahun, mencapai 12 juta hektar dan memengaruhi komunitas miskin di seluruh dunia. Dari 8.300 hewan yang diketahui, 8 persen telah punah dan 22 persen berada di ambang kepunahan. SDG berusaha melindungi dan memperbaiki penggunaan ekosistem darat, seperti hutan, rawa, lahan, dan gunung pada 2021. Mempromosikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan menghentikan penebangan hutan juga sangat penting untuk menghentikan dampak perubahan iklim. Harus segera dilakukan tindakan untuk mengurangi hilangnya habitat alami dan keanekaragaman hayati yang merupakan bagian dari warisan kita bersama.





MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN

Perdamaian, stabilitas, hak-hak asasi manusia, dan pemerintahan efektif, transparan dan akuntabel berdasarkan peraturan hukum adalah komponen penting dalam pembangunan berkelanjutan. Akan tetapi masih ada wilayah yang menghadapi konflik dan kekerasan. Konflik dan kekerasan tersebut menghambat pembangunan wilayah. Tidak hanya itu, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, tindak kejahatan, dan eksploitasi juga perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, tujuan mendorong perdamaian dan keadilan menjadi salah satu tujuan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

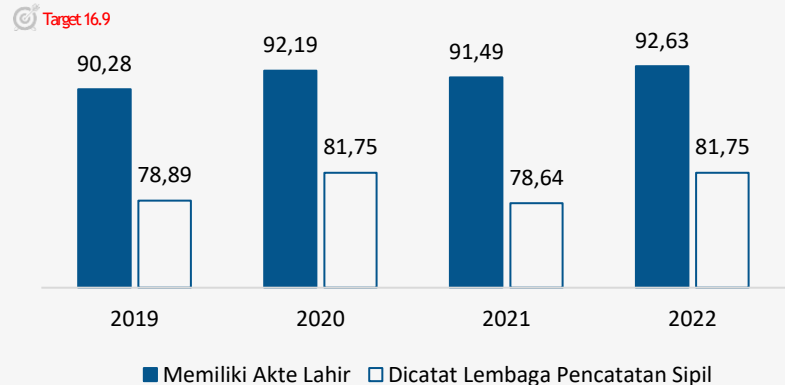


Gambar 35 Keterlibatan Perempuan di Parlemen (DPR dan DPRD) di Indonesia dan Provinsi Kalimantan Selatan, 2019-2022 (persen)

Keterwakilan perempuan sebagai perwakilan rakyat menggambarnya adanya pengambilan keputusan yang inklusif dan partisipatif. Keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 mencapai 20,00 persen. Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan keterwakilan perempuan di DPR yang mencapai 21,74 persen. Jika dilihat trennya, angka nasional terlihat terus meningkat lalu menurun di 2022 sedangkan Kalimantan Selatan stabil di angka 20 persen.

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pencatatan kelahiran anak adalah langkah awal dalam menjamin pengakuan anak di hadapan hukum, melindungi hak-haknya, dan memastikan bahwa kelalaian dalam hak ini tidak terjadi. Secara umum, pencatatan kelahiran anak di Kalimantan Selatan sudah terbilang baik. Akan tetapi setelah meningkat pada 2020, kepemilikan akta lahir dan pencatatan di lembaga pencatatan sipil mengalami penurunan pada 2021 lalu meningkat kembali di 2022. Pada tahun 2022, anak yang memiliki akta kelahiran sudah mencapai 92,63 persen dan anak yang kelahirannya tercatat di Lembaga Pencatatan Sipil sebanyak 81,75 persen.

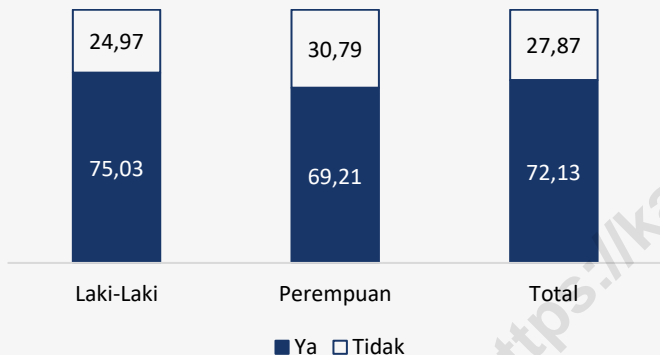


Gambar 36 Persentase Anak yang Memiliki Akta Kelahiran dan Proporsi Anak Umur di Bawah 5 Tahun yang Kelahirannya Dicatat oleh Lembaga Pencatatan Sipil di Provinsi Kalimantan Selatan, 2019-2022 (persen)



Pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan komitmen pada kemitraan dan kerja sama yang kuat. Pada tahun 2021, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang (dalam konteks ini wilayah) untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis, dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.

Target 17.8

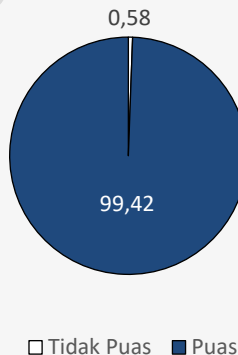


Gambar 37 Penduduk Berusia 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet di Provinsi Kalimantan Selatan, 2023 (persen)

Di tengah pandemi Covid-19, peran internet kian hari kian esensial untuk keperluan sehari-hari. Sekitar 27,87 persen penduduk berusia 5 tahun ke atas di Kalimantan Selatan pada tahun 2023 belum mendapatkan akses ke internet. Padahal, internet di sini mencakup akses ringan keseharian seperti WhatsApp dan Facebook. Dibandingkan antar jenis kelamin, lebih banyak penduduk laki-laki yang mampu mengakses internet dibandingkan dengan penduduk perempuan. Pada tahun 2023, sebanyak 75,03 persen penduduk laki-laki berusia 5 tahun ke atas bisa mengakses internet. Sementara untuk penduduk perempuan sebanyak 69,21 persen.

Sumber: Badan Pusat Statistik

Target 17.18



Gambar 38 Persentase Konsumen yang Puas terhadap Kualitas Data BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2023 (persen)

Sejalan dengan visi, yakni “Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”, BPS berupaya untuk secara terus menerus menyajikan data statistik berkualitas untuk digunakan baik oleh pemerintah dalam perencanaan pembangunan maupun oleh pihak swasta, seperti perusahaan, pelajar, dan peneliti. Kepuasan pengguna data menjadi evaluasi BPS untuk semakin meningkatkan tingkat pelayanan pada konsumen.

Berdasarkan hasil Survei Kebutuhan Data 2023, sebanyak 99,42 persen konsumen data BPS Provinsi Kalimantan Selatan merasa puas akan kualitas data BPS yang diperoleh.

ST 2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Jl. Soekarno Hatta (Trikora) No. 7 Banjarbaru Kalsel 70713

Telp. 0511-6749001 Homepage: <http://kalsel.bps.go.id>

E-mail: bps6300@bps.go.id